



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RAHMANTO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 461239

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.065.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m<sup>2</sup>/150 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 360.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m<sup>2</sup>/70 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
5. Tanah Seluas 175 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 298 m<sup>2</sup>/250 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA JEPARA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 330.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m<sup>2</sup>/20 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 81.400.000**

1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 400.000
2. MOTOR, HONDA BIC Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 13.500.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.945.812.148
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.105.712.148
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.105.712.148

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.